

**PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN BERAS UNTUK RAKYAT MISKIN (RASKIN)
OLEHTIM KOORDINSI RASKIN DI WILAYAH KECAMATAN CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Dini Sugianti

dinisugianti@yahoo.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : (1)Sejauh mana tim koordinasi raskin melakukan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN)? (2) Sejauh mana hambatan dalam mengatasi persoalan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) oleh tim koordinasi raskin?Sejauh mana upaya yang dilakukan oleh tim koordinasi raskin dalam mengatasi persoalan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 5 orang pegawai kecamatan dan 5 orang anggota tim koordinasi raskin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras raskin, maka pengawasan oleh Tim Koordinasi Raskin Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sangat dibutuhkan, baik dalam penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilantindakan koreksi bila diperlukan. Hambatan yang dihadapi oleh Tim Koordinasi Raskin dalam melaksanakan pengawasan dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah rendahnya SDM Tim Koordinasi Raskin, profesionalisme SDM, pengetahuan, keterampilan, dan dan sebagainya, yang menghambat pengawasan dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin).Upaya yang telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam mengatasi hambatan dalam proses pengawasan saat Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin).

Kata kunci: Pengawasan

A. PENDAHULUAN

Organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan.Organisasi mengelola berbagai rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi.Dalam organisasi setiap orang atau pegawai harus memiliki peran yang jelas tentang bagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

Untuk menciptakan keberhasilan organisasi, maka elemen-elemen sumber daya manusia yang terlibat didalamnya harus bekerjasama dengan baik agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap pegawai.Pengawasan menjadi unsur yang terpenting dalam menjalankan kegiatan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugas akan dapat terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu, apabila terjadi suatu penyimpangan maka dapat secara langsung mengambil langkah tindakan dan perbaikan seperlunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mendapatkan suatu hasil pekerjaan yang baik maka diperlukan pengawasan yang baik. Menurut Siagian (2014:112) menyatakan bahwa, "Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".Sementara itu Makmur (2011: 176) mengemukakan bahwa:

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan

dengan seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Pelaksanaan suatu kegiatan tanpa adanya suatu pengawasan dapat mengakibatkan adanya penyelewengan. Sehingga dibutuhkan pengawasan untuk memberikan dampak yang positif bagi siapapun yang akan menjadi sasaran dari kegiatan dan memberikan kemanfaatan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Handayani (1994:143) menyatakan bahwa : “ Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Dengan adanya pengawasan diharapkan kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat ditekan sedini mungkin, tujuan akhir keseluruhan yang pada akhirnya dapat membantu mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan pegawai yang efektif, seperti halnya pengawasan dalam pendistribusian program raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Pengawasan dalam melaksanakan program raskin dilaksanakan oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Tim Koordinasi Raskin Ciamis yaitu tim khusus yang dibentuk oleh Bupati Ciamis dan diberikan wewenang untuk mengurus masalah raskin di kabupaten Ciamis.

Program beras miskin (raskin) adalah program pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Program raskin diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi.

Dalam melakukan kegiatan pendistribusian program raskin di kabupaten Ciamis banyak sekali masalah yang dihadapi, salah satunya disebabkan karena belum terlaksananya tahapan pengawasan, antara lain:

1. Tim koordinasi raskin masih jarang melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan, sehingga dalam pelaksanaan pendistribusian program raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis masih banyak terjadi penyimpangan dan masalah-masalah yang dihadapi. Seperti pendistribusian raskin kepada masyarakat yang sering tidak sampai kepada masyarakat yang berhak, justru sampai kepada masyarakat yang mampu dikarenakan masyarakat tersebut kerabat petugas pembagian raskin.
2. Tim Koordinasi Raskin lebih sering melakukan pengawasan secara tertulis saja, sehingga tidak melihat akan kurangnya tanggung jawab pegawai dalam mengurus pendistribusian program raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari laporan penyaluran RTS-PM dari tingkat desa/kelurahan yang dibiarkan begitu saja dan keluhan dari masyarakat tentang permasalahan raskin seperti tidak tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat harga yang tidak segera ditindak lanjuti.

Dari paparan mengenai latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai: **“Pengawasan Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) oleh Tim Koordinasi Raskin di Wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis”**.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana tim koordinasi raskin di Wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN)?
2. Sejauh mana hambatan dalam mengatasi persoalan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) oleh tim koordinasi raskin di Wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?
3. Sejauh mana upaya yang dilakukan oleh tim koordinasi raskin di Wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dalam mengatasi persoalan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin)?

B. LANDASAN TEORI

Penelitian ini membahas suatu permasalahan tentang pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) oleh tim koordinasi raskin yang dirasa belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh tim koordinasi raskin sebagai pengawas dan mempunyai tugas

mengawasi atas kebijakan yang dijalankan pemerintah khususnya dalam bidang penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Dengan melihat permasalahan tersebut untuk penganalisaan pendekatan teori yang di gunakan dengan mengacu pada teori mengenai Pengawasan. Dimana pendekatan teori tersebut termasuk ke dalam bidang telaah dari kajian ilmu administrasi Negara. Oleh karena itu penganalisaan beserta teori yang digunakan mengacu pada pendekatan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu administrasi negara.

Sebagaimana diketahui bahwa pengertian dari administrasi negara merupakan proses penyelenggaraan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Atmosoedirdjo (1990:9), yaitu :

Administrasi Negara adalah ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern dari struktur-struktur dan proses-proses yang terdapat di dalam bagian yang penting dari sistem dan aparatur Negara.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kencana (2003: 33) bahwa: “Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah di organisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaga, dibiayai, digerakkan dan dipimpin”.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut memberikan pemaknaan mengenai penjelasan administrasi sebagai suatu aktivitas ketatalaksanaan sumber daya secara efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, maka dalam proses administrasi terdapat pula aktivitas pengawasan, yaitu bagaimana mengatur dan mengelola sebagai suatu proses atau kegiatan atau usaha dalam rangka mencapai tujuan tertentu mengenai kerjasama dengan orang lain. Dengan demikian maka cukup jelas kiranya pendekatan teoritis yang di gunakan sebagai bahan tela'ah permasalahan dalam penelitian ini akan tidak terlepas dari kajian ilmu administrasi negara dan pengawasan.

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan standar dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Beranjak dari hal tersebut, penulis menguraikan pengertian pengawasan Menurut Robin dalam Effendi (2014:206) yaitu:

Pengawasan adalah sama dengan pengendalian sebagai proses-proses

memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Sementara itu menurut Handoko (2007:359) menyatakan bahwa:

Pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengawasan dan pengendalian harus ditegakan pada saat perencanaan terhenti, dan mengambil tindakan perbaikan begitu di butuhkan. Atau dengan kata lain kegiatan pengawasan merupakan suatu tindakan untuk mengetahui, menganalisa, dan membandingkan segala sesuatu yang telah dilaksanakan dalam pekerjaan sesuai dengan rencana atau standar, serta melakukan koreksi bilamana terjadi penyimpangan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Adapun tahap-tahap pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Effendi (2014: 212) sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan
 - a. Standar fisik, mungkin meliputi barang atau jasa jumlah langganan atau kualitas produk
 - b. Standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja
 - c. Standar waktu meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan
2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
 - a. Pengamatan
 - b. Laporan-laporan
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi pengujian

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusan lah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, Tindakan koreksi diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Dengan demikian maka jelas bahwa pengawasan merupakan suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Melihat pada uraian teori tersebut di atas, di harapkan pengawasan oleh tim koordinasi raskin terhadap penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang di miliki oleh tim koordinasi raskin tersebut, sehingga tercipta transparansi dan akuntabel dalam proses pembangunan dan hasil pembangunan yang telah di laksanakan kepada masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Desain atau metode penelitian yang dijadikan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini penulis sajikan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut.

1. **Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN)**
1. **Petapan standar pelaksanaan,**
 - a. **Penetapan standar penyaluran bantuan beras raskin**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tim koordinasi raskin bersama pegawai kecamatan lainnya menetapkan standar penyaluran bantuan

beras raskin dengan cara melakukan survey atau pendataan kepada seluruh desa yang ada di bawah kecamatan Cijeungjing, atau menerima langsung hasil data dari kepala desa mengenai orang-orang yang layak memperoleh bantuan. Hal ini dirasa efektif, agar pemberian bantuan tepat sasaran.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa dalam hal menetapkan standar penyaluran bantuan beras raskin, pihak tim koordinasi raskin bekerja sama dengan pegawai kecamatan dan pemerintahan desa untuk memperoleh data orang-orang yang layak memperoleh bantuan beras miskin (raskin), sehingga pemberian bantuan tepat sasaran. Selain itu juga terkadang pihak tim koordinasi raskin tersebut turun langsung meninjau ke lapangan dengan tujuan agar pemberian bantuan tepat.

- b. **Tim koordinsi raskin menetapkan standar biaya yang harus diterima oleh rakyat miskin.**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Selama ini tim koordinsi raskin menetapkan standar penerimaan beras raskin per RTS-PM. Dimana masing-masing RTS-PM berhak menebus beras Raskin sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa sudah ada ketentuan yang jelas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya (harga) yang harus diperoleh oleh rakyat miskin dalam rangka menebus bantuan beras miskin yaitu Rp. 1600 / kg.

- c. **Penetapan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN)**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Penetapan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN) di Kecamatan Cijeungjing ditetapkan dalam 4 bulan sekali yakni dalam satu tahun 3 kali.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa waktu pemberian bantuan beras miskin oleh pemerintah telah ditetapkan selama 4 bulan sekali, atau dalam satu tahun memperoleh jatah bantuan selama 3 kali.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

a. Penetapan waktu perencanaan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, penetapan waktu perencanaan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN) dilaksanakan atas kesepakatan bersama, dimana bantuan yang diberikan tidak sekehandak masyarakat atau tim itu sendiri, melainkan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa dalam hal penetapan waktu perencanaan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN) dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, serta atas dasar kesepakatan bersama antara tim koordinasi beras miskin dengan pemerintah setempat.

b. Penentuan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, penetapan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN) dilaksanakan atas kesepakatan bersama, dimana bantuan yang diberikan tidak sekehandak masyarakat atau tim itu sendiri, melainkan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa dalam hal penetapan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN) dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, serta atas dasar kesepakatan bersama antara tim koordinasi beras miskin dengan pemerintah setempat.

c. Penentuan waktu evaluasi penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin menentukan waktu setiap bulan dengan tujuan agar penyaluran raskin dapat dilaksanakan secara efektif, dimana pelaksanaan bantuan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa bahwa Tim

Koordinasi Raskin menentukan waktu setiap bulan dengan tujuan agar penyaluran raskin dapat dilaksanakan secara efektif, dimana pelaksanaan bantuan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

a. Langkah yang dilakukan tim koordinsi raskin dalam melaksanakan pengamatan langsung ke lapangan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim koordinasi raskin melaksanakan pengamatan langsung ke lapangan dengan memberikan pengawasan langsung terhadap proses pelaksanaan penyaluran raskin.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa kedatangan tim koordinasi raskin melaksanakan pengamatan langsung ke lapangan bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi proses penyaluran bantuan beras raskin yang dilaksanakan oleh kecamatan, serta menindaklanjuti aturan-aturan yang telah ditentukan apakah dilaksanakan atau tidak.

b. Langkah yang dilakukan tim koordinsi raskin dalam membuat laporan-laporan hasil penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin membuat laporan-laporan hasil penyaluran raskin dengan tujuan agar proses penyaluran raskin dapat dipertanggungjawabkan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan evaluasi pada penyaluran raskin berikutnya.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa laporan-laporan hasil penyaluran raskin dibuat dengan tujuan agar proses penyaluran raskin dapat dievaluasi.

c. Bagaimana langkah yang dilakukan tim koordinsi raskin dalam menggunakan metode-metode otomatis dalam proses pengukuran penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin menggunakan metode-metode otomatis dalam proses pengukuran dengan maksud agar proses pengukuran dapat dilaksanakan secara fleksibel.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa untuk memperoleh proses penilaian yang tidak kaku dan mudah dimengerti, maka tim koordinasi raskin menggunakan metode-metode otomatis dalam proses pengukuran.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

a. Langkah yang dilakukan tim koordinsi raskin dalam menganalisis penyimpangan hasil pengukuran disesuaikan dengan standar.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Jika terjadi penyimpangan maka Tim Koordinasi Raskin menganalisis penyimpangan hasil pengukuran disesuaikan dengan standar.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa sejauh ini Tim koordinasi raskin menganalisis penyimpangan hasil pengukuran disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan.

b. Tim koordinsi raskin membandingkan hasil penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN) dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin membandingkan hasil penyaluran raskin dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa cara yang telah dilakukan TIM koordinasi raskin adalah dengan membandingkan hasil penyaluran raskin dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

c. Tim Koordinasi Raskin membuat analisis penyebab penyimpangan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin membuat analisis penyebab penyimpangan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa dalam rangka membuat analisis penyebab penyimpangan maka Tim Koordinasi Raskin harus membandingkan hasil yang diperoleh dengan aturan yang berlaku.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

a. TIM Koordinasi Raskin melaksanakan tindakan koreksi sesuai standar.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, tim Koordinasi Raskin melaksanakan tindakan koreksi sesuai standar, untuk mencapai kesesuaian.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa Selama ini tim koordinasi raskin melaksanakan tindakan koreksi sesuai standar

b. Tim Koordinasi Raskin melaksanakan perbaikan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, tim koordinasi raskin melaksanakan perbaikan secara menyeluruh, seperti dari perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasi.

Sementara itu hasil observasi menunjukkan bahwa melaksanakan perbaikan secara menyeluruh dengan maksud agar proses penyaluran raskin dapat berjalan sesuai dengan rencana.

2. Hambatan dalam Mengatasi Persoalan Pengawasan Penyaluran Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) oleh Tim Koordinsi Raskin di Wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, adalah:

1. Penetapan standar pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam penetapan standar pelaksanaan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Masih rendahnya SDM Tim Koordinasi Raskin dalam penetapan standar pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- b. Masih kurangnya dana aspirasi yang diperlukan masyarakat untuk penetapan standar pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di

- Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- c. Masih kurangnya pengelolaan masyarakat dalam banyak hal teknik dalam penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

 - a. Kurang sarana yang mendukung dalam pelaksanaan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh TIM Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - b. Kurang fasilitas yang mendukung penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - c. Kurang prasarana dalam menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

 - a. Kurang profesionalisme SDM Tim Koordinasi Raskin dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - b. Kurang pengetahuan Tim Koordinasi Raskin tentang cara pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - c. Kurang keterampilan Tim Koordinasi Raskin dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

 - a. Ketidak tepatan sasaran
 - b. Kualitas beras di bawah rata-rata
 - c. Jumlah yang dibagikan bukan dalam bentuk ukuran karung
 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh Tim Koordinasi raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

 - a. Kurang profesionalisme SDM Tim Koordinasi Raskin dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - b. Kurang pengetahuan Tim Koordinasi Raskin tentang cara pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - c. Kurang keterampilan Tim Koordinasi Raskin dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
3. **Upaya yang telah Dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Mengatasi Hambatan dalam Proses Pengawasan Saat Pengawasan penyaluran bantuan beras**

untuk rakyat miskin (Raskin) Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Upaya-upaya yang di lakukan Tim Koordinasi Raskin dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan dalam penyaluran bantuan beras raskin Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

1. Penetapan standar pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam penetapan standar pelaksanaan oleh tim koordinasi raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Meningkatkan SDM Tim Koordinasi Raskin dalam penetapan standar pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- b. Meningkatkan dana aspirasi yang diperlukan masyarakat untuk penetapan standar pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- c. Memperbaiki pengelolaan masyarakat dalam banyak hal teknik dalam penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Hasil di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisien dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembang kualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan dan pemberhentian.

2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Meningkatkan profesionalisme SDM TIM Koordinasi Raskin dalam penentuan pengukuran pelaksanaan

kegiatanoleh tim koordinasi raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

- b. Meningkatkan pengetahuan tim koordinasi raskin tentang cara penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- c. Meningkatkan keterampilan Tim Koordinasi Raskin dalam menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Meningkatkan profesionalisme SDM Tim Koordinasi Raskin dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- b. Meningkatkan pengetahuan Tim Koordinasi Raskin tentang cara pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- c. Meningkatkan keterampilan TIM Koordinasi Raskin dalam pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh TIM Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan oleh TIM Koordinasi Raskin dalam Penyaluran

bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Meningkatkan profesionalisme SDM TIM Koordinasi Raskin dalam pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - b. Meningkatkan pengetahuan Tim Koordinasi Raskin tentang cara pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - c. Meningkatkan keterampilan Tim Koordinasi Raskin dalam pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh Tim Koordinasi raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Meningkatkan profesionalisme SDM Tim Koordinasi Raskin dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh Tim Koordinasi raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- b. Meningkatkan pengetahuan Tim Koordinasi Raskin tentang cara pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- c. Meningkatkan keterampilan Tim Koordinasi Raskin dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di

Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras raskin, makapengawasan oleh Tim Koordinasi Raskin Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sangat dibutuhkan, baik dalam penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilantindakan koreksi bila diperlukan. Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Tim Koordinasi Raskin dalam melaksanakan pengawasan dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah rendahnya SDM Tim Koordinasi Raskin, profesionalisme SDM, pengetahuan, keterampilan, dan dan sebagainya, yang menghambat pengawasan dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- c. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam mengatasi hambatan dalam proses pengawasan saat Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah meningkatkan SDM Tim Koordinasi Raskin , profesionalisme SDM, pengetahuan, keterampilan, dan dan sebagainya, yang menunjang pengawasan dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

2. SARAN

- a. Peranan pengawasan oleh Tim koordinasi Raskin Kecamatan dalam

- penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis perlu terus ditingkatkan mengingat keberadaan Tim Koordinasi Raskin sangat membantu pelaksanaan proses penyaluran raskin .
- b. Pemerintah desa hendaknya lebih mengutamakan hambatan yang dihadapi dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
 - c. Upaya-upayayang sedang dan telah dilaksanakan hendaknya lebih diutamakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoedirdjo.1990.*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Effendi, 2014.*Kepemimpinan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Handayaningrat, 1994. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunur Agung.
- Handoko, 1994.*Manajemen*, Edisi 2, penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Kencana. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Makmur.2011. *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bina Aksara
- Siagian.2014 *Organisasi Kepemimpinan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.